

LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat : 17 Februari 2022	No. Surat : 100/100/sekret/14/2022
Alamat Surat	DITUJUKAN KEPADA
Pakarti pascor	☒ SEKERTARIAT ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☐ KASUBBAG KEUANGAN ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
NO. AGENDA	☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK ☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ KASI KELAHIRAN ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
PERIHAL	☐ BIDANG PIK ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. ☐ BIDANG PDIP ☐ KASI PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ KASI KERJASAMA ☐ KASI INOVASI PELAYANAN
tindak lanjut hasil kegiatan sosialisasi manajemen Risiko khusus Eselon II di lingkungan pemerintah Kab. Paser	
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKRETARIS Sebagai bahan pengumpulan L/14/3/22	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA	109/Dups/2022
TGL DITERIMA	10 / maret 2022
YANG MENERIMA	



BUPATI PASER

Tana Paser, 17 Februari 2022

Nomor : 700/ 160 /Sekt/Itidakab/II
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Sosialisasi
Manajemen Risiko Khusus Eselon II Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Paser (Terlampir)
di -

Tana Paser

Menindaklanjuti Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko Khusus Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: LBA-476/PW17/3/2021 Tanggal 23 Desember 2021.

Berkenaan hal tersebut, terkait dengan penyelesaian tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian Saudara untuk ditindaklanjuti berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi pada Pemerintah Kabupaten Paser terdapat beberapa hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dengan struktur Pengelola Risiko masih dalam proses penyusunan;
- b. Implementasi Manajemen Risiko belum sepenuhnya dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yaitu:
 - 1) Belum adanya Monitoring terhadap Rencana Tindak Pengendalian di OPD pada Pemerintah Kabupaten Paser;
 - 2) Belum updatenya register risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis perangkat daerah, dan risiko operasional perangkat daerah beserta rencana tindak pengendaliannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diinstruksikan kepada Saudara agar segera menindaklanjuti saran hasil kegiatan sosialisasi dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yaitu dengan:

- 1) **Melaksanakan monitoring terhadap Rencana Tindak Pengendalian di OPD masing-masing.**
- 2) **Melakukan updating terhadap register risiko strategis Pemerintah Daerah, risiko strategis perangkat daerah, dan risiko operasional perangkat daerah beserta rencana tindak pengendaliannya.**

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara.


WAKIL BUPATI PASER
[Handwritten Signature]
HJ. SYARIFAH MASITAH ASSEGAF, SH

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tana Paser
2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser
4. Inspektur Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser

Daftar Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	Inspektorat
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Dinas Kesehatan
6	Dinas Perhubungan
7	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
14	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16	Dinas Sosial
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
19	Dinas Ketahanan Pangan
20	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21	Satuan Polisi Pamong Praja
22	Dinas Perikanan
23	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
24	Dinas Perkebunan dan Peternakan
25	Dinas Pemadam Kebakaran
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah
29	Badan Pendapatan Daerah
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik